

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan ringkasan mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. Pengertian Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Sistem akuntansi pengeluaran kas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi e-Penatausahaan.

b. Dokumen-dokumen yang digunakan

- SPD (Surat Penyediaan Dana);
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
- SPM (Surat Perintah Membayar);
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- SPJ/LPJ (Surat/Laporan Pertanggungjawaban).

c. Catatan Akuntansi yang digunakan

- Buku Kas Umum;
- Buku Simpanan Bank;
- Buku Simpanan Tunai;
- SPJ-Belanja;
- Register SPP;
- Register SPM;
- Register SP2D.

d. Fungsi-fungsi yang terkait

- Fungsi yang terkait dalam penerbitan SPD antara lain:
  - Kepala Bagian Anggaran selaku Kuasa BUD;
  - Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).
- Fungsi yang terkait dalam pengajuan SPP UP/GU/TU/LS yaitu:
  - Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - PPK-SKPD;
  - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Fungsi yang terkait dalam penerbitan SPM UP/GU/TU/LS yaitu:
  - PPK-SKPD;
  - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Fungsi yang terkait dalam penerbitan SP2D antara lain:
  - Kepala Bagian Perbendaharaan selaku Kuasa BUD;
  - Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e. Uraian Prosedur Pengeluaran Kas

Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dimulai dengan penerbitan SPD lalu berdasarkan SPD Bendahara pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. Dalam proses pembuatan SPP, Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan sistem aplikasi e-Penatausahaan. Berdasarkan SPP tersebut, PPK-SKPD menyiapkan SPM yang selanjutnya dikirim ke Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan selaku Kuasa BUD secara online dengan menggunakan sistem aplikasi tersebut. Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM beserta lampirannya yang sudah dinyatakan lengkap/sah. Dengan adanya SP2D terjadi aliran dana dari Kas Daerah (KASDA) ke rekening Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam proses pencairan dana untuk dibagikan ke bagian-bagian yang memerlukan dana tersebut.

#### **4.2 Saran**

Sistem akuntansi pengeluaran kas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan keuangannya haruslah lebih teliti lagi dalam proses menatausahakannya, karena dalam proses penatausahaan sangatlah penting supaya nantinya tidak merugikan pihak yang lain. Untuk sistem aplikasi e-Penatausahaan harus dikembangkan lagi lebih lanjut agar dapat memudahkan semua pihak yang terlibat dalam proses penatausahaan pengeluaran kas serta sistem tersebut diharapkan dapat menjadi suatu sistem yang efisien dan efektif.